

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak munculnya reformasi pada tahun 1998 gebrakan dan gerakan demokrasi mulai menjadi wacana di Indonesia. Demokrasi dianggap menjadi suatu solusi yang mampu membebaskan mereka dari tekanan yang ada. Hampir semua negara di dunia meyakini demokrasi sebagai tolok ukur tak terbantah dari keabsahan politik. Keyakinan bahwa kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintah menjadi basis bagi tegak kokohnya sistem politik demokrasi(Winarno,2007:89). Pada saat reformasi yang membanggakan demokrasi, muncul juga pertanyaan yang merisaukan sekaligus menyalahkan yaitu “Kenapa di era PKn ini kajian Pancasila seolah lenyap ditelan gelombang reformasi?” Padahal pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern(Latar Belakang BSNP).

Di bagian lain, kerisauan muncul bagi pegiat PKn yang menyatakan bahwa tanpa menyebut eksplisit Pancasila dalam PKn

pun, maka lazimnya sebagai mata pelajaran yang bertanggung jawab membentuk karakter warga negara yang baik, maka mustahil PKn bertolak belakang dengan maksud dan tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila itu sendiri(Samsuri,2012:1). Bukan hanya hal itu saja namun PKn yang juga sebagai bagian dari sistem politik yaitu berfungsi dalam pendidikan politik dan sistem mentenen atau pemelihara Pancasila. Hal inilah yang menyebabkan semakin terpojoknya PKn dalam tugasnya mengemban Pancasila.

Pancasila pada negara Indonesia tidak hanya merupakan dasar negara Indonesia melainkan juga berkedudukan sebagai ideologi nasional negara Indonesia. Dalam ideologi yang digunakan oleh suatu bangsa terkandung banyak nilai-nilai yang baik, luhur dan dianggap menguntungkan bagi negara tersebut baik untuk masa kini dan masa sekarang. Sesuai rumusan pertama yang disampaikan Ir.Soekarno Pancasila menjadi ideologi yang komprehensif integral, ideologi Pancasila menjadi ideologi yang khas yang berbeda dengan ideologi lain(Winarno,2007:24).

Nilai-nilai Pancasila yang ideal ialah nilai-nilai Pancasila menurut pandangan dari pendiri-pendiri negara. Buku Negara Paripurna karangan Yudi Latif(2011:5) telah membahas nilai-nilai ideal Pancasila mulai dari lahirnya hingga aktualisasi atau penerapannya. Nilai-nilai tersebut ialah :

1. Ketuhanan yang berkebudayaan

2. Kemanusiaan universal
3. Persatuan dalam kebhinnekaan
4. Demokrasi permusyawaratan
5. Keadilan sosial

Dari kelima nilai tersebut merupakan gabungan dari nilai-nilai Pancasila menurut pendiri-pendiri bangsa ini.

Dari kelima nilai-nilai Pancasila tersebut, nilai demokrasi telah menjwai pada sila keempat. Hal ini membuktikan lebih luasnya Pancasila daripada demokrasi itu sendiri. Sila keempat ini merupakan cita-cita kedaulatan rakyat dalam semangat kekeluargaan yang memberi ruang bagi multikulturalisme ini bergema kuat dalam sanubari bangsa Indonesia sebagai pantulan dari pengalaman pahit penindasan kolonial dan gotong royong dalam masyarakat Indonesia (Yudi Latif,2011:384).

Beberapa yang lainnya juga mengembangkan nilai-nilai Pancasila agar menuju kepada nilai-nilai ideal yang diharapkan. Materi pada tingkatan Sekolah Menengah Atas kelas X mengembangkan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dimana mewujudkan pandangan yang khas tentang pentingnya kerja sama antar manusia, dalam hubungan manusia dengan kekuasaan, sumber kekuasaan dari penguasa, dan tingkat kesederajatan antarmanusia(Budiyanto,2007:19). Bukan hanya Pancasila saja namun

tuntutan pendidikan karakter dalam pembelajaran PKn menambah keinginan untuk melahirkan PKn yang baru.

Pendidikan karakter di Indonesia diterapkan untuk menjaga nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Dari pendidikan karakter yang masuk ke dalam pembelajaran PKn diharapkan agar nilai tersebut tidak hanya ada untuk sementara, melainkan dapat mampu menjadi karakter bagi semua anak Indonesia. Karakter yang diinginkan tentunya karakter Pancasila yang sesuai kepribadian bangsa.

Konsep mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menurut standar isi 2006 merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Keyakinan itupun diyakini oleh negara Indonesia. Mereka mulai menanamkan demokrasi sejak sedini mungkin. Mulai dari pendidikan tingkat dasar sudah diperkenalkan dengan pengertian demokrasi. Indonesia ingin berpartisipasi dalam perkembangan demokrasi khususnya dalam hal pembentukan pribadi-pribadi yang memiliki jiwa-jiwa demokrasi Pancasila. Sekolah memiliki peran sebagai sarana sosialisasi nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi

digunakan sebagai tonggak berdirinya negara yang menerapkan demokrasi Pancasila.

Adapun landasan pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Indonesia yaitu Pembukaan UUD 1945 dan sila keempat pada Pancasila. Dengan adanya landasan hukum tersebut maka pelaksanaan Demokrasi Pancasila memiliki kepastian hukum di Indonesia.

Dengan berkembangnya pula demokrasi pada masa ini, maka Indonesia diharapkan dapat menegakkan demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Mewujudkan bangsa yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil dan sejahtera pada dasarnya adalah upaya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai cita-cita bersama.

Nilai- nilai demokrasi lebih mudah dipahami ketika dibandingkan dengan nilai-nilai otoriter. Misalnya saja nilai *egalitarian* atau lebih dikenal dengan hak-hak kesetaraan akan sangat terlihat berbeda jika dibandingkan nilai *feudal* atau hak-hak yang hanya dimiliki oleh penguasa atau orang tertentu saja (Cholisin,2012:2). Dalam dunia pendidikan khususnya dalam lingkup kelas, orang yang dianggap penguasa ialah guru yang mengajar sedangkan rakyat ialah siswa itu sendiri. Hak-hak kesetaraan yang ada bukan hak yang membuat siswa tidak menghargai dan menghormati guru karena dianggap setara sebagai teman, namun hak setara dalam hal menyampaikan pendapat. Kelas yang hidup dan berhasil bukanlah kelas yang kekuasaan penuh di pegang oleh guru melainkan kelas

yang memberikan kesempatan bagi murid tersebut untuk menyampaikan pendapat dan guru dapat menerima pendapat tersebut walaupun ada perbedaan.

Sebagai tempat dimana tunas bangsa menerima pendidikan baik pendidikan formal dan informal, sekolah diharapkan mampu membentuk calon-calon pemimpin yang membawa negaranya kearah demokrasi Pancasila yang sebenar-benarnya. Agar nantinya demokrasi tidak dianggap hanya sebagai kebebasan semata namun juga sebagai kebebasan yang bertanggung jawab berdasarkan Pancasila. Hal ini juga di sesuaikan dengan tujuan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri yakni agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut :

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan BSNP)

Pentingnya demokrasi dalam negara yang memegang pemerintahan di tangan rakyat, maka dari itu peneliti mengambil judul pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila dalam penelitiannya. Penelitian ini, yang berlokasi di SMA Se-kecamatan Depok diharapkan peneliti dapat mendapatkan dan belajar dari pengalaman masing-masing guru di masing-masing sekolah agar kelak saat peneliti menjadi guru maka ia mampu menjadi sarana perkembangan demokrasi yang baik. Bukan hanya dapat digunakan untuk peneliti saja namun semua mahasiswa yang mengambil jurusan Pendidikan Kewarganegaraan maupun mahasiswa yang lain.

Alasan pengambilan lokasi di kecamatan Depok karena sebelumnya peneliti pernah mengadakan PPL di SMA Negeri 1 Depok dan melihat bagaimana guru kelas XI menggunakan metode pembelajaran yang kreatif setiap pertemuannya, sehingga membuat peneliti ingin mengetahui pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila yang ada dan ingin menambah wawasan yang lebih lagi dengan mengambil subyek penelitian se-Kecamatan Depok . Peneliti ingin memberikan paparan tentang bagaimana masing-masing sekolah mengembangkan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Tidak hanya itu saja namun peneliti ingin dapat mematahkan segala pendapat yang mengatakan Pancasila

lenyap dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Selain itu alasan pemilihan pada siswa SMA, karena usia pada masa SMA merupakan usia dimana seseorang beralih dari usia remaja menuju usia dewasa. Usia tersebut sangat rentan dan selektif dalam menerima ilmu maupun pendapat dari orang lain, maka akan bermacam-macam hambatan yang akan dialami oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan nilai-nilai demokrasi Pancasila bagi siswa SMA.

Hambatan dalam pengembangan nilai-nilai demokrasi Pancasila akan dapat memunculkan ide-ide dan metode dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Metode tersebut dapat berupa diskusi, game atau juga dengan belajar di luar kelas. Penggunaan metode pembelajaran yang menarik dapat membuat siswa tersebut paham akan materi yang disampaikan dan juga menghilangkan rasa bosan dan kantuk dalam menerima pembelajaran. Kreativitas dari guru sangat dituntut demi dapat menanamkan materi namun juga secara tidak langsung merupakan pembelajaran yang bersifat demokratis.

Melihat proses dan hambatan dalam mengembangkan nilai-nilai demokrasi Pancasila maka akan muncul pula cara untuk mengatasi berbagai hambatan yang didapat masing-masing guru. Kemampuan guru dalam mengatasi hal ini dapat dijadikan pembelajaran bagi peneliti agar kelak mampu mengatasi segala

hambatan yang ada, maka dari itu judul yang tepat untuk mewakili semuanya ialah Pengembangan Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA se-Kecamatan Depok. Judul tersebut telah mewakili semua alasan dari keinginan tahuan peneliti.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat diteliti yaitu :

1. Peran Pendidikan Kewarganegaraan kurang dalam Pancasila.
2. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ideal bagi Indonesia, namun belum dapat dilaksanakan sesuai keinginan dari pendiri negara
3. Pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila dalam lingkungan siswa Sekolah Menengah Atas masih sangat terbatas
4. Belum adanya peran masing-masing guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila, dalam kelas pada siswa Sekolah Menengah Atas Se-kecamatan Depok.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti di atas maka peneliti memberikan batasan penelitian ini pada beberapa permasalahan yaitu :

1. Masalah yang dihadapi Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengembangan Pancasila.
2. Dapat terwujudnya nilai-nilai Demokrasi Pancasila yang ideal sesuai dengan tujuan pembelajaran dari masing-masing guru
3. Cara masing-masing guru dalam mengembangkan nilai-nilai Demokrasi Pancasila pada siswa Sekolah Menengah Atas.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pengembangan nilai-nilai demokrasi Pancasila melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA se-kecamatan Depok. Peneliti membagi menjadi empat rumusan masalah tersebut yakni :

1. Apa tujuan yang ingin dicapai guru dalam pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Se-kecamatan Depok?
2. Materi apa saja yang mampu mendukung dalam pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila melalui

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Se-kecamatan Depok?

3. Strategi apa saja yang dapat digunakan dalam pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Se-kecamatan Depok?
4. Media apa saja yang dapat digunakan dalam pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Se-kecamatan Depok?
5. Bagaimana proses penilaian dalam mengembangkan nilai-nilai Demokrasi Pancasila melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Se-kecamatan Depok?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui :

1. Tujuan guru dalam mengembangkan nilai-nilai demokrasi Pancasila melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Se-kecamatan Depok.
2. Materi dalam pengembangan nilai-nilai demokrasi Pancasila melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Se-kecamatan Depok.

3. Strategi dalam pengembangan nilai-nilai demokrasi Pancasila melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Se-kecamatan Depok.
4. Media dalam pengembangan nilai-nilai demokrasi Pancasila melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Se-kecamatan Depok.
5. Proses penilaian dalam pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Se-kecamatan Depok.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian yang berjudul “Pengembangan Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA se-Kecamatan Depok” ialah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya
2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan bagi :

a. Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana berfikir ilmiah dan merupakan bentuk penerapan pengembangan demokrasi Pancasila dalam kapasitas peneliti sebagai calon tenaga pengajar Pendidikan Kewarganegaraan.

b. Guru/Tenaga Pengajar

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru atau tenaga pengajar khususnya pengampu Pendidikan Kewarganegaraan sebagai acuan dalam proses pengembangan demokrasi Pancasila dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

c. Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber pengetahuan khususnya bagi mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan maupun mahasiswa jurusan lainnya.

G. Batasan Istilah

Guna memberikan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman maupun perbedaan tafsir antar pembaca dan peneliti, maka peneliti memberikan penjelasan tentang definisi secara etimologis dan terminologis yaitu :

1. Pengembangan

Pengembangan ialah proses, cara, perbuatan mengembangkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia,1993:414). Proses yang dilakukan merupakan proses agar menjadikan lebih besar maupun sempurna.

2. Nilai-nilai

Nilai-nilai merupakan sifat-sifat atau hal-hal yang berguna atau penting bagi kemanusiaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1993:615).

3. Demokrasi Pancasila

Soekarno mengungkapkan bahwa “Demokrasi yang harus kita jalankan adalah Demokrasi Indonesia, membawa kepribadian Indonesia sendiri (Soekarno,1958 dalam Yudi Latif,2011:475). Dalam buku lain penulis yang lain menyatakan bahwa “Negeri dan masyarakat Indonesia bisa dijadikan tempat mengembangkan demokrasi. Sebutlah ‘Demokrasi Indonesia’ atau ‘Demokrasi Pancasila” (Riza Noer,1996:XI)

4. Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan menurut standar isi 2006 merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan

berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD
1945 (Standar Isi Mata Pelajaran PKn)